



KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PENGELOLAAN LAPORAN PENGELOLAAN JKN TAHUN 2025

Dinas Sosial

Pemerintah Kabupaten Gowa



Dinassosial

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /TOR

SKPD	:	Dinas Sosial
Program	:	Program Perlindungan Jaminan Sosial
Tujuan Program	:	Untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat melalui sistem perlindungan yang terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Kegiatan	:	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran	:	Rp 207.868.000,00

A. Latar Belakang

Penanganan fakir miskin merupakan prioritas pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Salah satu instrumen penting adalah ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Di Kabupaten Gowa, masih terdapat dinamika perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menyebabkan perlunya pemutakhiran data secara berkala. Ketidaktepatan data dapat berdampak pada tidak optimalnya penyaluran bantuan sosial, termasuk program jaminan kesehatan.

Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara data fakir miskin dengan data peserta PBI JKN agar tepat sasaran.

Melalui kegiatan ini, Dinas Sosial Kabupaten Gowa melaksanakan pengelolaan data fakir miskin yang terintegrasi dengan kepesertaan PBI JKN guna meningkatkan kualitas layanan sosial dan kesehatan bagi masyarakat.

B. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia
- Peraturan Menteri Sosial terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah terkait penanggulangan kemiskinan

C. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas data fakir miskin
2. Menyediakan basis data yang valid untuk program bantuan sosial
3. Mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data
4. Mengurangi kesalahan sasaran (inclusion/exclusion error)

D. Data Rilis Kemiskinan Kabupaten Gowa

Sebagai dasar penajaman sasaran kegiatan, berikut disajikan data rilis resmi kemiskinan Kabupaten Gowa dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi acuan pemutakhiran data fakir miskin:

- Persentase penduduk miskin Kabupaten Gowa per 30 November 2025 tercatat sebesar 6,64%, turun 0,21 poin persentase dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 6,85%.
- Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tren kemiskinan Kabupaten Gowa menunjukkan penurunan yang konsisten, dari sekitar 8,4% menjadi 6,64%.

- Jumlah penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2024 tercatat sebanyak 806.910 jiwa (BPS).
- Dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Selatan, tingkat kemiskinan Kabupaten Gowa ($\pm 6\%$) berada pada kategori menengah-rendah, lebih baik dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta Jeneponto ($\pm 11\%$), namun masih di atas Kabupaten Wajo, Sidenreng Rappang, dan Kota Makassar ($\pm 4\text{--}5\%$).

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa – Profil Kemiskinan Kabupaten Gowa dan Katadata Insight Center (Databoks), 2025-2026.

Data rilis ini digunakan sebagai basis pembandingan (cross-check) terhadap hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS/DTSEN) di lapangan, guna memastikan konsistensi antara data resmi BPS dengan data by name by address yang dikelola Dinas Sosial, serta menjadi indikator keberhasilan program penanggulangan kemiskinan dan perluasan kepesertaan PBI JKN di Kabupaten Gowa.

E. Penerima Manfaat

1. Komposisi Penerima Manfaat

Komposisi penerima manfaat dalam kegiatan pengelolaan data fakir miskin di Kabupaten Gowa disusun berdasarkan tingkat kesejahteraan (DTSEN), status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Adapun komposisinya sebagai berikut:

a. Berdasarkan Desil Kesejahteraan (DTSEN):

- Desil 1 (Sangat Miskin): $\pm 20\text{--}30\%$ dari total sasaran → Menjadi prioritas utama dalam pemutakhiran data dan penetapan PBI JKN
- Desil 2 (Miskin): $\pm 20\text{--}25\%$ → Prioritas tinggi untuk intervensi bantuan sosial dan jaminan kesehatan
- Desil 3 (Rentan Miskin): $\pm 20\text{--}25\%$ → Sasaran program perlindungan sosial preventif dan verifikasi kelayakan PBI JKN
- Desil 4 (Rentan Menengah Bawah): $\pm 10\text{--}20\%$ → Dipertimbangkan secara selektif berdasarkan hasil verifikasi lapangan
- Desil 5 (Menengah): $\pm 5\text{--}10\%$ → Tidak menjadi prioritas utama, namun tetap masuk dalam proses pemutakhiran data

2. Karakteristik Penerima Iuran JKN

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu yang ditetapkan berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Secara umum, mereka berada pada kelompok kesejahteraan terbawah (Desil 1, 2, dan sebagian Desil 3), dengan kondisi ekonomi yang ditandai oleh pendapatan rendah atau tidak tetap, keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, serta ketergantungan terhadap bantuan sosial. Sebagian besar bekerja di sektor informal, tidak memiliki jaminan penghasilan yang pasti, dan rentan terhadap guncangan ekonomi seperti kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan.

Selain itu, penerima PBI JKN memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan akibat kondisi ekonomi dan sosial yang kurang mendukung. Mereka umumnya belum mampu membayar iuran JKN secara mandiri, memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi, serta sering kali disertai kondisi kerentanan seperti lansia, penyandang disabilitas, atau keluarga dengan tanggungan besar. Dari sisi administrasi, penerima PBI JKN harus memiliki data kependudukan yang valid dan terintegrasi, serta melalui proses verifikasi dan validasi agar tepat sasaran dan meminimalkan kesalahan inklusi maupun eksklusi dalam penetapan peserta.

F. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Strategi Diferensiasi Intervensi (Tailored Support)

Strategi Diferensiasi Intervensi (Tailored Support) adalah pendekatan pelaksanaan kegiatan yang menyesuaikan bentuk intervensi berdasarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga, kondisi sosial ekonomi, serta hasil pemutakhiran data (DTSEN/DTKS). Strategi ini menekankan bahwa setiap

kelompok penerima manfaat tidak diperlakukan sama, tetapi diberikan dukungan sesuai tingkat kebutuhan dan kerentanannya agar intervensi menjadi lebih tepat sasaran dan efektif.

2. Strategi Penguatan Kontrol dan Partisipasi (Empowerment)

Strategi Penguatan Kontrol dan Partisipasi (Empowerment) merupakan pendekatan dalam pengelolaan data fakir miskin yang menempatkan masyarakat dan pemerintah di tingkat paling bawah sebagai aktor utama dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi data. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, serta akuntabilitas data melalui keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat penerima manfaat. Dengan pendekatan ini, proses pendataan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga partisipatif dan berbasis pengawasan sosial.

3. Strategi Integrasi dan Sinergi

Strategi Integrasi dan Sinergi merupakan pendekatan yang menekankan keterpaduan antar data, program, dan kelembagaan dalam pengelolaan data fakir miskin serta penetapan peserta PBI JKN di Kabupaten Gowa. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendataan, verifikasi, dan pemanfaatan data dilakukan secara terpadu, konsisten, dan berbasis sistem informasi yang sama, sehingga tidak terjadi duplikasi data maupun perbedaan basis data antar instansi. Integrasi ini juga menjadi dasar dalam mewujudkan satu data yang valid untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan.

G. Waktu Pelaksanaan Tahapan Kegiatan

Matrik Waktu Pelaksanaan – Tahun 2025

No	Tahapan	Tahun 2025											
		F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1.	Aduan Masyarakat												
2.	Pemeriksaan Data												
3.	Penginputan Data												
4.	Rekonsiliasi Data bersama BPJS												
5.	Rilis Data												

H. Waktu Pencapaian Keluaran

Akan dicapai keseluruhan pada bulan Desember 2025.

I. Biaya yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan pada Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial ini sebesar Rp 207.868.000,00.

Sungguminasa, 15 Januari 2025



Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Gowa

Drs. H. Firdaus, S.Ag, M.Si
NIP. 19710628 199303 1 012